

**PENGARUH KESADARAN, TINGKAT EKONOMI
DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
MOTIVASI DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**

(Survei pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**WAHYU CAHYO SETYO PUTRO
NIM. 115030400111089**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2018

Jam : 13.00 WIB

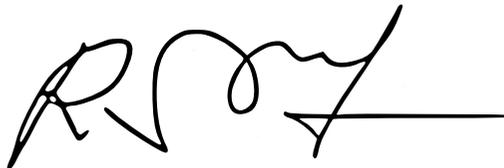
Skripsi Atas Nama : Wahyu Cahyo Setyo Putro

Judul : Pengaruh kesadaran ,tingkat ekonomi dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat motivasi dalam membayar pajak bumi bangunan di kota Malang

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



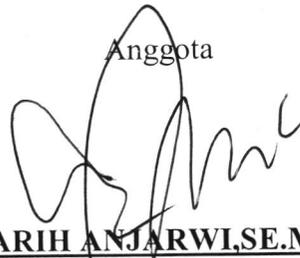
Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos,M.AP
NIK. 19770502 200212 1 003

Anggota



Dr.Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si
NIK.19750305 200604 2 001

Anggota



ASTRI WARIH ANJARWISE.MSA.Ak
NIK.20130487 0316 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2018



Nama : WAHYU CAHYO SETYO PUTRO
NIM : 115030400111089

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : WAHYU CAHYO SETYO PUTRO
NIM : 115030400111089
Program Studi : Perpajakan
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 22 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Asal : Jl.Simpang KH.Yusuf perum Puskopad blok E12A Kec: Lowokwaru
Kota Malang
No.HP : 085649644456
Alamat Email : Cahyocoy@yahoo.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1998-2003 : SDN KEPANJENLOR III Kota Blitar
2003-2004 : SDN LOWOKWARU IV Kota Malang
2004-2007 : SMPN 18 Kota Malang
2007-2010 : SMA LABORATORIUM Kota Malang
2011-2018 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Demikian Curriculum vitae yang dapat saya berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

Wahyu Cahyo Setyo Putro





Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orangtua ku, Ayah dan Ibu yang selalu sabar,
serta penuh kasih sayang dalam merawat,
mendidik, membiayai, dan memberikan teladan yang baik.

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang pada tahun 2012-2017 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PBB, dengan diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Namun tidak bisa dijadikan acuan bahwa motivasi Wajib Pajak PBB semakin tinggi dari tahun ketahun. Penentuan target penerimaan PBB masih sangat rendah bahkan nilai target penerimaan masih dibawah realisasi penerimaan PBB dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi dari Wajib Pajak sebenarnya masih sangat rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB yang merupakan penduduk kota Malang untuk tahun pajak 2018. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak yang cukup belum bisa memberikan pengaruh motivasi kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perlu adanya upaya lebih dari fiskus dalam memberikan edukasi bukan hanya sekedar upaya mengedukasi mengenai tata aturan perpajakan saja, tapi lebih kepada pemahaman yang lebih mendalam dari pajak itu sendiri seperti kenapa pajak itu ada dan seberapa penting pajak bagi kelangsungan negara Indonesia.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan dan Motivasi

Abstract

Property Taxes are taxes on land and / or buildings that are owned, controlled and / or utilized by individuals or entities, except for areas used for plantation, forestry and mining business activities. Revenue of property tax in Malang City in 2012-2017 shows an increase of property tax revenue, followed by an increase of tax payers amount. However, it cannot be used as a reference that the motivation of tax payers increase from year to year. The target determination still very low, even the revenue target still under the realization of previous year property tax revenue. It showed that the motivation level of tax payers actually still low.. The research method used is multiple regression analysis method. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires distributed to United Nations taxpayers who were residents of the city of Malang for fiscal year 2018. The research finding showed that the knowledge of tax payers can not give motivation influence to the tax payers to pay the property tax. It need more effort from fiscus in giving education not only to educate about the tax regulation only, but to depth understanding about the tax itself, such as why the tax present and how important the tax for the continuity of Indonesia state.

Keywords : Tax payer Awareness, Economic Level, Knowledge and Motivation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena atas kesehatan serta akal pikiran yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (Survei pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang Tahun)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sangat berpengaruh dalam menyelesaikan skripsi ini. Kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Saparilla M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Rizki Yudhi Dewantara S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi,yang telah memberikan bimbingan,maupun saran atau skripsi ini
5. Kepala Penagihan Pajak Bumi Bangunan Kota Malang Ibu Luluk Khafifah, SE yang telah membantu memberikan data yang diperlukan untuk skripsi ini
6. Spesial buat Bapak dan Ibu saya yg selalu mendukung dan memberikan doa untuk skripsi ini
7. Spesial untuk Putri Mardiana yang telah mensupport peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh teman-teman yang telah membantu untuk memberikan semangat dan masukan
9. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca.

Malang, Mei 2018

Peneliti,



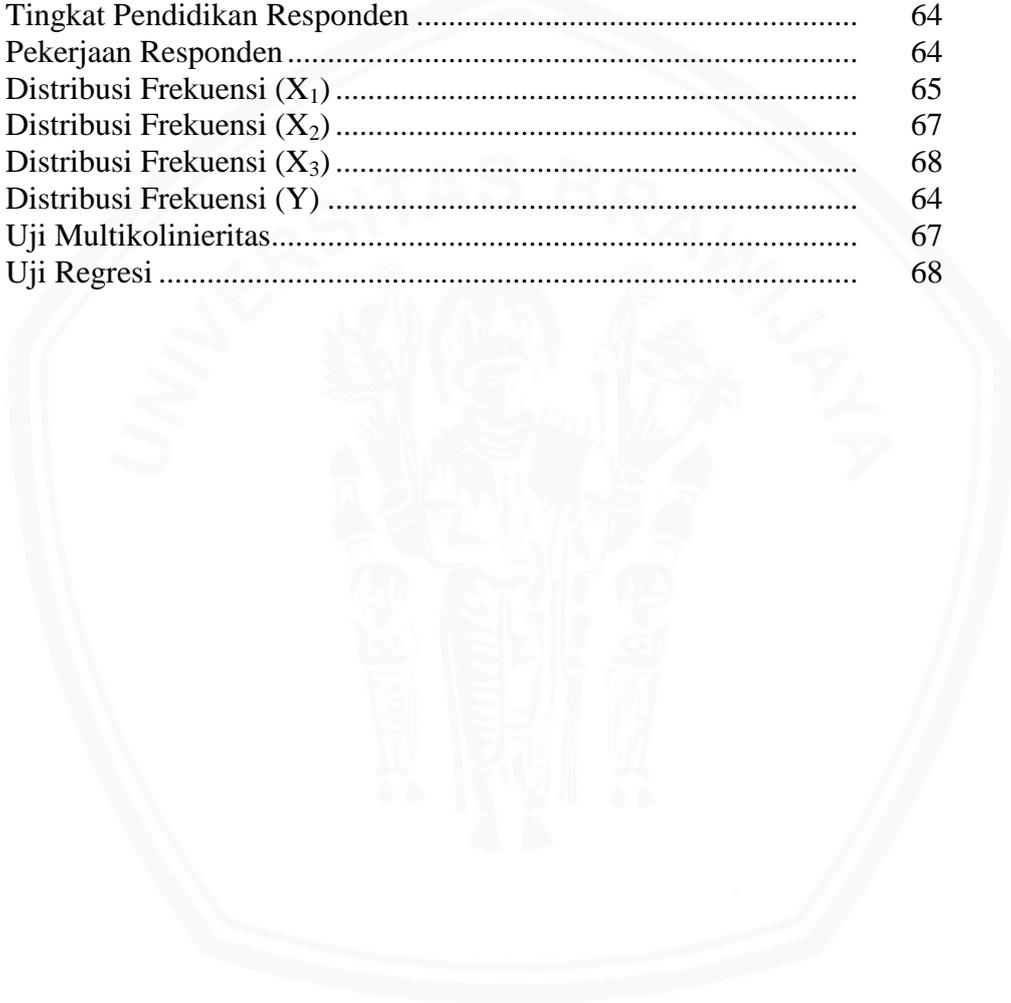
DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Pajak	15
2. Pajak Daerah.....	20
3. Pajak Bumi dan Bangunan	22
4. Motivasi Pajak.....	25
C. Kerangka Pemikiran dan Model Hipotesis.....	42
1. Kerangka Pemikiran	43
2. Model Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel Penelitian	46
1. Populasi	46
2. Sampel.....	46
D. Definisi dan Operasional Variabel	47
1. Variabel Bebas	47
2. Variabel Terikat.....	49
E. Skala Pengukuran	50
F. Sumber Data Penelitian	51
G. Metode Pengumpulan Data	51
1. Kuesioner.....	51
2. Dokumentasi.....	52
H. Instrumen Penelitian	52
1. Uji Validitas	53

	2. Uji Reabilitas	53
I.	Analisis Data	54
	1. Analisis Statistik Deskriptif.....	54
	2. Analisis Statistik Inferensial.....	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
	1. Profil Kota Malang	60
	2. Visi dan Misi Kota Malang	60
B.	Statistik Deskriptif.....	62
	1. Gambaran Umum Responden	63
	2. Tabel Distribusi Frekuensi	65
C.	Statistik Inferensial.....	71
	1. Uji Asumsi Klasik	71
	2. Model Persamaan Regresi	73
	3. Goodness of Fit	74
	4. Pengujian Hipotesis	74
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
	1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak	76
	
	2. Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Motivasi Wajib Pajak	77
	3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak	79
BAB V	PENUTUP.....	80
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PBB	4
2.1	Kajian Empiris	14
3.1	Definisi Operasional Variabel.....	50
3.2	Tabel Penentuan Skor	51
3.3	Uji Validitas Instrumen.....	53
3.4	Uji Reliabilitas	54
4.1	Jenis Kelamin Responden	63
4.2	Umur Responden	63
4.3	Tingkat Pendidikan Responden	64
4.4	Pekerjaan Responden	64
4.5	Distribusi Frekuensi (X_1)	65
4.6	Distribusi Frekuensi (X_2)	67
4.7	Distribusi Frekuensi (X_3)	68
4.8	Distribusi Frekuensi (Y)	64
4.9	Uji Multikolinieritas.....	67
4.10	Uji Regresi	68



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Kerangka Pemikiran.....	41
2	Model Hipotesis	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1). Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya (Resmi, 2009:9). Yang tergolong pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P-3. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2009:9). Yang termasuk pajak daerah tingkat I (pajak provinsi) antara lain

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Yang termasuk pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan untuk kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Selain itu, yang dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kuburan umum, situs peninggalan purbakala, hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional, tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, dan tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Dasar pengenaan NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikatakan memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi kepada PAD daerah. Target dan realisasi penerimaan PBB sering kali belum maksimal, masih banyak potensi penerimaan PBB yang belum tergali secara maksimal. Penentuan target penerimaan yang terkesan rendah juga menjadi permasalahan dari penerimaan PBB.

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang pada tahun 2012-2017 dapat disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan
di Kota Malang pada Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Jumlah WP
1	2012	46.832.035.094	39.447.201.803	118,72%	249.903
2	2013	47.843.891.288	45.651.921.983	104,80%	252.601
3	2014	53.881.514.370	53.869.267.940	100,02%	257.057
4	2015	58.614.789.726	53.869.267.940	108,81%	260.107
5	2016	62.416.413.408	56.869.268.000	109,75%	262.781
6	2017	59.269.169.120	56.869.268.000	104,22%	265.837

(Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang pada tahun 2012-2017 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PBB dengan diikuti dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak, namun kondisi ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa motivasi wajib pajak PBB semakin tinggi dari tahun ke tahun. Penentuan target penerimaan PBB masih sangat rendah bahkan nilai target penerimaan masih dibawah realisasi penerimaan PBB dari tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak potensi penerimaan PBB yang belum tercapai secara maksimal meskipun setiap tahun realisasi penerimaan PBB selalu diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi dari wajib pajak sebenarnya masih sangat rendah. Langkah nyata yang harus dilakukan oleh negara dalam mendukung motivasi wajib pajak yaitu kesadaran secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun beberapa dimensi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak antara lain dorongan dari diri sendiri, pemahaman hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, pelayanan yang didapat dari pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak/pemerintah, dan sistem yang berlaku bagi Wajib Pajak.

Pada sisi yang lain masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Selanjutnya mengenai pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak tidak terlepas dari peran Dispenda, yaitu mensosialisasikan tentang perpajakan itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kerelaan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Motivasi Menurut Robert L Malthisdan John H. Jackson, adalah suatu kehendak atau keinginan yang timbul dari diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi juga dapat diartikan sebagai rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan

pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai. Mencapai benda atau bukan benda tersebut (Munir, 2001:136). Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki individu. Karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah, pesimis, dan tidak terdorong untuk beraktifitas.

Tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dapat menunjukkan dukungan dari warga negara dalam upaya untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang, menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. karena dengan kesadaran ini maka pendapatan daerah akan meningkat serta target dan realisasi akan tercapai.

Rendahnya motivasi wajib pajak jika dibiarkan saja tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai sampai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi ancaman yang serius dalam fenomena ini. Pemerintah perlu melakukan usaha untuk meningkatkan motivasi wajib pajak khususnya wajib pajak PBB.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara

sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, pada sisi yang lain masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian di Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang, Jawa Timur dengan mengambil tema tentang **“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (Survei pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang Tahun 2018)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang?
2. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang?
3. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan motivasi

wajib pajak Bumi Bangunan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dengan harapan penelitian yang dilakukan dapat lebih berkembang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat pokok bahasan dalam kajian pustaka antara lain adalah tinjauan teori, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode kuantitatif yang terdiri dari pokok bahasan yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan data serta variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi responden, analisis data, interpretasi hasil dan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris

1. Istanto (2015). Penelitian dengan judul “Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak”. Metode yang digunakan adalah *convenience sampling* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Data dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara individual berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel pengetahuan pajak terhadap motivasi wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi dan waktu

2. Imaniah (2013) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel bebas persepsi wajib pajak, penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis yang

digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel penghasilan dan berpengaruh secara signifikan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu variabel bebas menggunakan simultan sedangkan penelitian ini menggunakan parsial selain itu perbedaan lokasi dan waktu.

3. Jatmiko (2013). Penelitian yang berjudul “Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan populasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Semarang”. Berdasarkan data KPP akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WPOP yang merupakan WPOP efektif, dengan sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, data diolah dan dianalisa dengan regresi linear berganda.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan analisa regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi dan waktu

4. Supriyanto (2014). Penelitian berjudul tentang “Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan”. Data dikumpulkan

melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Data disajikan dalam analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat pajak bumi dan bangunan.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan berpengaruh secara signifikan. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi dan waktu selain itu peneliti terdahulu variabel bebas menggunakan simultan sedangkan penelitian ini menggunakan parsial.

Berdasarkan uraian, penelitian terdahulu dapat dipetakan sesuai pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian dan alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Istanto (2015)	Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak	pengetahuan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi, tingkat pendidikan, motivasi Alat Analisis: regresi berganda	pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara individual berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak
2.	Imaniah (2013)	Persepsi dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Persepsi, penghasilan, kepatuhan wajib pajak Alat Analisis:	Persepsi dan penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

			regresi linier berganda	
3.	Jatmiko (2013)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan populasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Semarang	sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus , kesadaran perpajakan ,kepatuhan wajib pajak Alat Analisis: regresi linear berganda	sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Supriyanto (2014)	Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan ,kepercayaan masyarakat, kepatuhan Alat Analisis: analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial parametrik	variabel pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat pajak bumi dan bangunan

Sumber: Istanto (2015); Imaniah(2013); Jatmiko (2013); Supriyanto (2014) diolah oleh peneliti (2018)

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2002:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Markus (2005:1) “Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat

(swasta) yang, berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalti”. Sedangkan menurut Ilyas (2002:4) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa adanya kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sehubungan dengan pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, berarti pemungutan pajak sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan itu artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat

ditagih dengan menggunakan surat paksaan. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik maupun badan.

b. Fungsi Pajak

Menurut Rahman (2010:21) pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansury (2002) dalam Priantara (2012:7) terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang ada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak dari aparaturnya.

2) *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak, dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan.

3) *Full Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri, dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang.

4) *Withholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *Self Assessment System* dan *Self Assessment System*.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Rahman (2010:24) pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- 4) Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang
- 5) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- 6) Pemungutan pajak harus efisien
- 7) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

e. Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007: 171), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (UU KUP) atau pihak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh dari badan tersebut meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, lembaga, dan beberapa bentuk lainnya.

f. Macam-Macam Pajak

Menurut Rahman (2010:45) pembagian pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak. Pembagian pajak berdasarkan sifat-sifat tertentu:

- 1) Pajak atas kekayaan dan pendapatan
- 2) Pajak atas lalu lintas
- 3) Pajak yang bersifat kebendaan
- 4) Pajak atas pemakaian

Pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu:

- 1) Pajak subjektif dan pajak objektif
- 2) Pajak langsung dan tidak langsung
- 3) Pajak umum (pusat) dan pajak daerah

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2011:79), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk kedalam pajak provinsi antara lain:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Sedangkan yang termasuk kedalam pajak kabupaten/kota antara lain:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak

- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

c. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP dilakukan oleh kepala daerah.

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu "*movere*" yang berarti menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Hasibuan, 2006:141).

A. Teori Maslow

Salah satu teori motivasi yang paling banyak diacu adalah teori "Hirarki Kebutuhan" yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu hirarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan pokok manusia yang diidentifikasi Maslow dalam urutan kadar pentingnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Fisiologis (Basic Needs)

Misalnya sandang, pangan, papan dan kesejahteraan individu.

2) **Kebutuhan akan Rasa Aman (Security Needs)**

Dikaitkan dengan kerja maka kebutuhan akan keamanan sewaktu bekerja, perasaan aman yang menyangkut masa depan karyawan

3). **Kebutuhan Afiliasi atau Akseptansi (Social Needs)**

a) Kebutuhan akan perasaan diterima di mana ia bekerja

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati

c) Kebutuhan untuk bisa berprestasi

d) Kebutuhan untuk bisa ikut serta

4) **Kebutuhan penghargaan (Esteem Needs)**

Jenis kebutuhan ini menghasilkan kepuasan seperti kekuasaan, prestasi, status dan keyakinan akan diri sendiri.

5). **Kebutuhan Perwujudan Diri (Self-Actualization)**

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling tinggi, yakni kebutuhan untuk menjadi orang yang dicita-citakan dan dirasakan mampu mewujudkannya. Koontz, (1990:121)

B. Teori Dua Faktor Herzberg

Herzberg mengklaim telah menemukan penjelasan dua faktor motivasi yaitu:

- 1) Hygiene Factors , yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. (Eksternal)
- 2) Motivation Factors , yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. (Internal) Koontz, (1990:123)

C. Teori Kebutuhan ERG Alderfer

Teori ERG Alderfer (Existence, Relatedness, Growth) adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh Clayton P. Alderfer. Teori Alderfer menemukan adanya 3 kebutuhan pokok manusia:

- 1) Existence Needs (Kebutuhan Keadaan) adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman serta Hygiene Factors dari Herzberg.
- 2) Relatedness Needs (Kebutuhan Berhubungan), mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow dan hygiene factors dari Herzberg.
- 3) Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow dan motivation factors dari Herzberg. Koontz, (1990:121)

D. Teori Motivasi Ekspektansi

Teori motivasi ini diungkapkan oleh Vroom. Vroom mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Koontz, (1990:123)

E. Teori Motivasi Klasik

Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Griffin, (1998:259)

F. Teori X dan Y

Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Ia membedakan 2 tipe pekerja yaitu X dan Y.

- 1) Teori X, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerja sama.
- 2) Teori Y, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi produktif. Griffin, (1998:260)

Menurut Maulida (2011:57) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak Wajib Pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya. Motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari Wajib Pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi ini dapat berasal dari dalam ataupun luar individu Wajib Pajak. Faktor-faktor pendorong motivasi Wajib Pajak antara lain:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama

dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulit menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen. Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) Tingginya *Tax Ratio*
- 4) Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- 5) Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan Wajib Pajak.
- 6) Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara Wajib Pajak PPh, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat Wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut *official assessment system* sedangkan yang non PBB sudah menganut *self assessment system*. Menurut Pudjo Susilo (2002:23) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi.
- 2) Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) menyatakan: “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Faktor negatif atau yang menghambat tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para Wajib Pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi calon Wajib Pajak, Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.

- 4) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarakan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak

b. Tingkat Ekonomi

Dalam struktur sosial kemasyarakatan banyak terdapat ukuran-ukuran di dalam pelapisan-pelapisan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah stratifikasi sosial, diantaranya adalah pelapisan yang terjadi karena kekayaan seseorang yang lebih dikenal dengan sebutan tingkat ekonomi. Sebelum beranjak lebih jauh untuk memahami hal tersebut perlu untuk menelaah kembali pengertian dari ekonomi itu sendiri sebagai arti dasar pembentukan tingkatan atau pelapisan yang terjadi di dalam struktur social kemasyarakatan tersebut. Ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu “oikos” dan “nomos” yang berarti tata laksana rumah tangga (Rosyidi, 2009:5).

Dapat dilihat dari namanya maka pada saat pertama kali diperkenalkan ekonomi sendiri mempunyai ruang lingkup kajian dan permasalahan yang sangat terbatas yaitu hanya pada tata laksana rumah tangga dan hanya pada permasalahan mencukupi kebutuhan rumah tangga saja. Untuk melihat definisi ekonomi secara utuh Rosyidi (2009:7) mendefinisikannya sebagai berikut : “ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karna perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran”.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi secara umum mengkaji mengenai pemenuhan kebutuhan manusia dan kemakmuran manusia, dua hal pokok dari permasalahan ekonomi tersebut yaitu kebutuhan dan pencapaian kemakmuran merupakan salah satu dasar di dalam pelapisan sosial di dalam bila dihubungkan dengan permasalahan mikro tingkat ekonomi masyarakat, dengan kata lain semakin makmur seseorang dan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai tingkatannya maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi seseorang di dalam struktur sosial kemasyarakatan, lebih lanjut kita dapat melihat definisi lain seperti yang diungkap Silk (dalam Rosyidi, 2009:27) “ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (*Wealth*) dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh

kerjanya sehari-hari, serta sumber-sumber material yang mereka dapatkan”.

Dari definisi di atas terdapat satu unsur yaitu kekayaan yang menjadi ukuran di dalam studi tentang ekonomi tersebut dimana unsur kekayaan dan sumber-sumbernya merupakan kunci sukses di dalam pemenuhan tingkatan kebutuhan manusia. Dengan kekayaan maka pemenuhan kebutuhan akan tercapai, dimana semakin kaya seseorang maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memenuhi tingkatan kebutuhannya. Selanjutnya Rosyidi (2009:35) menyatakan: “begitu banyak tujuan hidup seseorang akan tetapi satu hal yang pasti yaitu bahwa setiap orang tentu ingin memiliki pendapatan yang cukup yang akan memungkinkan untuk memilih cara hidup yang dipilih dan yang disukainya, semakin besar pendapatannya akan semakin luas kesempatan yang terbuka baginya untuk memenuhi keinginannya”. Berdasarkan ungkapan dapat kita lihat manusia selain mempunyai kebutuhan (*needs*) juga mempunyai keinginan (*wants*), yang mana peneliti membedakannya sebagai berikut bahwa konsep kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia yang bersifat ahiriah seperti makan, minum, sandang pangan, namun berbeda dengan konsep keinginan yaitu sesuatu yang tidak harus dipenuhi namun menjadi harapan untuk dimiliki dalam kehidupan seseorang. Dari uraian di atas pendapatan seseorang juga terkait dengan ukuran ekonomi seseorang dimana dengan pendapatan yang besar akan

menuju kepada kekayaan dan akses terhadap pemenuhan tingkatan kebutuhan akan semakin besar.

Dari semua uraian tentang ekonomi di atas dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang individu dan masyarakat yang mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat yang terdiri dari berbagai hierarkis kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasilkan beberapa unsur untuk mendukung konsep tersebut namun kesemuanya itu apabila ditelaah tetap mengacu kepada satu konsep yaitu kemampuan akses terhadap pemenuhan terhadap pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang bermuara kepada kemakmuran seseorang, kemampuan akses tersebut diwujudkan melalui pendapatan seseorang dan kekayaannya yang bertujuan untuk pemenuhan berbagai tingkatan kebutuhan dan keinginannya tersebut. Aspek-aspek yang mendukung kearah pemenuhan kebutuhan tersebut teergolong dalam unsur indikator penentuan tingkatan ekonomi seseorang di dalam masyarakat.

c. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua

aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015:73).

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal. Pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, mengerti, dan pandai (Salam, 2003:26). Pengetahuan adalah merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu obyek tertentu (Mubarok, dkk, 2007:34).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru di dalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan), yaitu (Notoatmodjo, 2014:28).

1) *Awareness* (kesadaran) Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).

- 2) *Interest* (merasa tertarik) Terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- 3) *Evaluation* (menimbang-menimbang) Terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.
- 4) *Trial*, Sikap dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- 5) *Adaption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*longlasting*). Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama. Jadi, Pentingnya pengetahuan disini adalah dapat menjadi dasar dalam merubah perilaku sehingga perilaku itu langgeng.

Tingkat Pengetahuan ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo, 2014:53), yaitu :

- 1) Tahu (*know*) dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima dengan cara menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

- 2) Memahami (*Comprehention*) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- 3) Aplikasi (*Application*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya. Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya.
- 4) Analisis (*Analysis*) merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antara satu dengan yang lain dapat ditunjukkan dengan menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan sebagainya.
- 5) Sintesis (*Synthesis*) merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan dapat menyusun formulasi yang baru.
- 6) Evaluasi (*Evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi penelitian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau kriteria yang sudah ada. Pengetahuan diukur dengan wawancara atau angket tentang materi yang akan di ukur dari objek penelitian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan Notoatmodjo (2014:33), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :

1) Pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut .

2) *Mass media* / informasi. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan

atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, penyuluhan dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

- 3) Sosial budaya dan ekonomi. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.
- 4) Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena

adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

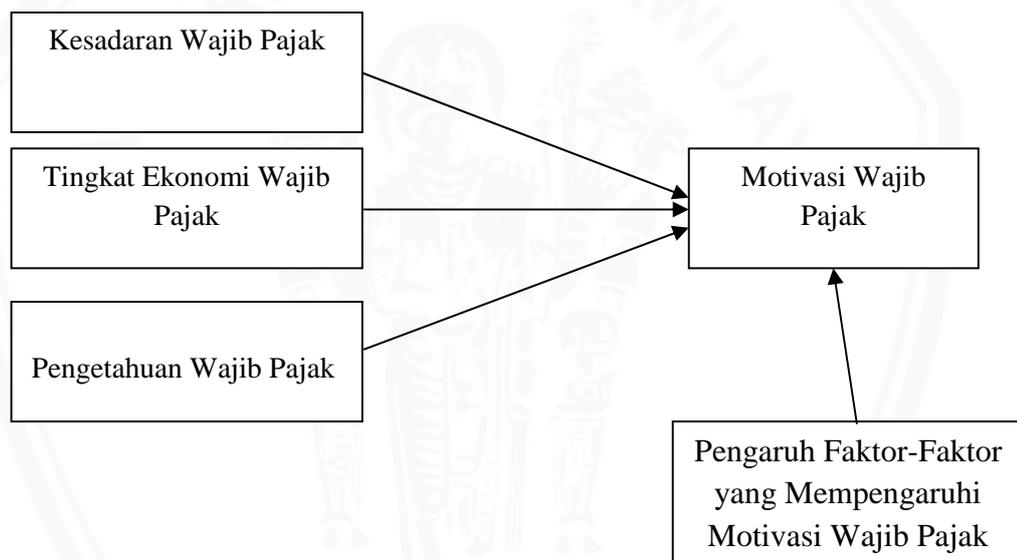
- 5) Pengalaman. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan.
- 6) Usia. Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia tengah (41-60 tahun) seseorang tinggal mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada usia dewasa. Sedangkan pada usia tua (> 60 tahun) adalah usia tidak produktif lagi dan hanya menikmati hasil dari prestasinya. Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan sehingga menambah pengetahuan (Cuwin, 2012:41).

C. Kerangka Pemikiran dan Model Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan sebuah pemahaman peneliti yang melandasi penelitian yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran dapat dijelaskan dengan suatu diagram atau skema yang menjelaskan secara garis besar alur logika sebuah penelitian. Penelitian ini mempunyai konsep pemahaman tentang pengaruh kesadaran

Wajib Pajak, tingkat ekonomi, dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



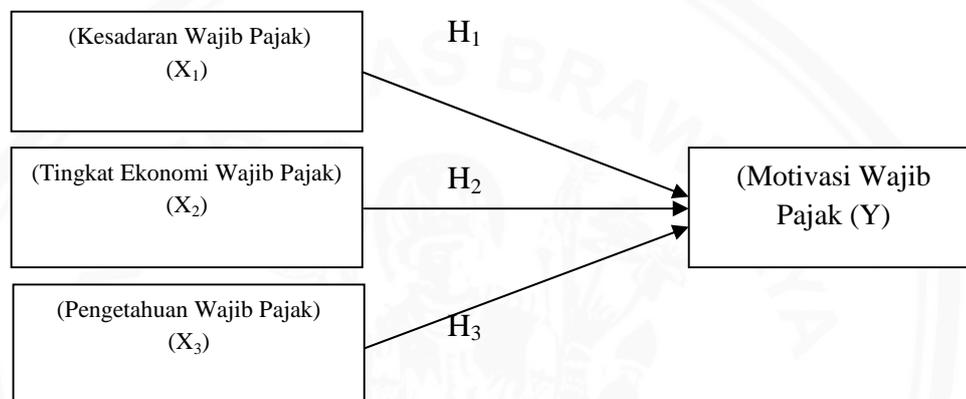
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

2. Model Hipotesis

Berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasan, penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif/hubungan yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran Wajib Pajak, tingkat ekonomi dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat

motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang. Model rancangan penelitian secara sederhana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Hipotesis
Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Keterangan :

—————> : pengaruh secara parsial

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.
2. Tingkat ekonomi berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.
3. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel X dan Y. Menurut (Singarimbun dan Effendi, 2006:5) penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak yang terdaftar mempunyai kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2006:72) yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian ini untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat di Kota Malang yang merupakan wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar tahun 2018.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2006:73), yaitu: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi namun tetap mampu mewakili populasi tersebut. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan rumus dari Hair, Jumlah sampel yang representatif menurut Hair et al. (2010:122) adalah jumlah indikator dalam instrumen penelitian dikali 5-10. Peneliti disini menggunakan nilai maksimum sehingga rumus penentuan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= \text{Jumlah Indikator} \times 10 \\ &= 10 \times 10 \\ &= 100 \text{ Sampel}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sample*. Jadi penelitian ini dilakukan pada 24 April tahun 2018 di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang pada Wajib Pajak dengan kriteria mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam Sugiyono (2011:38), pada dasarnya variabel penelitian adalah atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Bebas (Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan variabel dependen, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran wajib pajak (X_1)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Jatmiko, 2006). Indikatornya yaitu kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dengan item sebagai berikut:

- 1) Persepsi wajib pajak
- 2) Karakteristik wajib pajak
- 3) Urgensi Pajak

b. Tingkat ekonomi (X_2)

Kemampuan secara ekonomi dari wajib pajak dan kemampuan ekonomi ini menunjukkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan utama yang dilakukan oleh wajib pajak (Jatmiko, 2006). indikatornya yaitu mengenai penetapan tingkat ekonomi yaitu kemampuan wajib pajak dalam pemenuhan kebutuhan.

c. Pengetahuan wajib pajak (X_3)

Informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Sony & Rahayu, 2006). Variabel ini diukur dengan melihat indikator dan item sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
- 2) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2. Variabel Terikat (dependen)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi perubahan variabel independen. Dalam hal ini variabel dependen yaitu mengenai tingkat motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang (Y). Motivasi adalah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku, yaitu apakah individu termotivasi, tanpa motivasi atau apatis. Besarnya motivasi juga mempengaruhi kesesuaian antara rencana dengan tujuan. Tingginya motivasi yang bersifat positif dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan begitu pula sebaliknya (Maulida, 2011). Indikator motivasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dengan item yaitu meliputi:

- a. Kejujuran
- b. Kesadaran dalam membayar pajak
- c. Keinginan untuk membayar pajak

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	1. Persepsi Wajib Pajak	Kesadaran membayar pajak sebagai warga negara yang baik
	2. Karakteristik Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu
	3. Urgensi	Kesadaran Wajib Pajak pentingnya pembayaran pajak bagi penerimaan negara
Tingkat Ekonomi (X ₂)	1. Kemampuan Wajib Pajak dalam pemenuhan kebutuhan	Kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok
		Kemampuan pemenuhan kebutuhan diluar kebutuhan

		pokok
Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	1. Pengetahuan batas waktu	Pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu
	2. Pengetahuan mengenai KUP	Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
	3. Pengetahuan Sistem Perpajakan	Pengetahuan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan
Motivasi Wajib Pajak (Y)	1. Kejujuran	Kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
	2. Kesadaran	Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan
	3. Keinginan/dorongan	Keinginan berkontribusi dengan cara membayar pajak

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018)

E. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2011:92), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif, menjelaskan skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert* karena digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi Wajib Pajak orang pribadi khususnya pajak bumi dan bangunan. Dengan menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penentuan Skor

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2011:93)

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, diambil, dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan teknik kuisisioner. Kuisisioner berisikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh wajib pajak PBB yang ada di Kota Malang.
2. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara contohnya yaitu daftar tabel realisasi dan target penerimaan PBB di Kota Malang.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Kuisisioner (angket)

Menurut Sugiyono (2006:135), “Kuisisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, dimana

alternatif jawaban telah disediakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak PBB yang membayar di Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang yang telah memenuhi kriteria sampel.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:231), selain pengumpulan data primer juga dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu “melalui teknik dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan”. Selain menggunakan data primer peneliti juga menggunakan data sekunder diantaranya yaitu daftar realisasi dan target penerimaan PBB di kota Malang yang diperoleh dari Dispenda Kota Malang.

H. Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r_{hitung} dengan koefisien r_{Tabel} dengan menggunakan derajat signifikan () sebesar 5% dari *degree of freedom* ($df = n-2$, (r tabel untuk penelitian ini adalah 0,197) dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Sunyoto, 2011). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

- a. Jika r_{hit} positif dan $r_{hit} > r_{t_0}$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hit} negatif atau $r_{hit} < r_{t_0}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Koefisien	r Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,774	0,197	Valid
	X _{1.2}	0,755	0,197	Valid
	X _{1.3}	0,764	0,197	Valid
Tingkat Ekonomi (X ₂)	X _{2.1}	0,882	0,197	Valid
	X _{2.2}	0,916	0,197	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₃)	X _{3.1}	0,731	0,197	Valid
	X _{3.2}	0,743	0,197	Valid
	X _{3.3}	0,767	0,197	Valid
Motivasi Wajib Pajak (Y)	Y _{1.1}	0,732	0,197	Valid
	Y _{1.2}	0,772	0,197	Valid
	Y _{1.3}	0,764	0,197	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Semua item pernyataan dinyatakan valid karena koefisien korelasi lebih besar dari r tabel dengan nilai 0,197. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sekaran (2006:33) keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah pengukuran. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini

menggunakan uji reliabilitas dengan teknik *Cronbach's alpha*. Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95% (Arikunto, 2006:77). Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,640	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)	0,759	Reliabel
Tingkat Ekonomi (X_3)	0,600	Reliabel
Motivasi Wajib Pajak (Y)	0,624	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

I. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran maupun deskripsi mengenai nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk data kuantitatif sedangkan data kualitatif menggunakan distribusi frekuensi (Ghozali, 2006:19).

2. Analisis Statistik Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi apakah persamaan regresi memiliki nilai yang tidak bias, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atau variable-variabel yang dipakai dalam penelitian ini diterima atau tidak. Uji asumsi klasik

dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:43). Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang nantinya akan dipadukan dengan kurva Normal Q-Q Plots. Menurut Akbar (2005:33) Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan pengujian ini adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi adalah normal (Santoso, 2006).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:56). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Menurut Wijaya (2011:56) multikolinearitas dapat dilihat dari *VIF*, jika *VIF* < 10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ghozali (2001:23), menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan komputer SPSS *for windowsreleased* 21,00.

b. Persamaan Regresi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali

digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas (Sujianto, 2007:45). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi dan pengetahuan wajib pajak. Oleh karena itu, model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Malang orang pribadi di Kabupaten Malang

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Tingkat ekonomi

X_3 = Pengetahuan wajib pajak

e = *Error*

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T. Uji-t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai statistik *t* dengan statistik

kritis menurut Tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan (t_{hitung}) lebih tinggi nilai t menurut Tabel (t_{Tabel}), kita menerima hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011:44).

d. Godness Of Fit

Godness of fit yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengujian koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:45). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

$R^2 = 0$ (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi cukup sejuk terletak pada 90km sebelah selatan kota Surabaya dan wilayahnya di kelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di utara timur dan di kenal dengan julukan kota pelajar.

- 1) Nama Kota : Kota Malang
- 2) Provinsi : Jawa Timur
- 3) Batas Wilayah :
 - a. Utara : Kabupaten Malang
 - b. Selatan : Kabupaten Malang
 - c. Barat : Kabupaten Malang
 - d. Timur : Kabupaten Malang
- 4) Luas Wilayah : 145,28 Km²
- 5) Jumlah Penduduk : 871.145 Jiwa
- 6) Wilayah Administrasi : Kecamatan: 5, Kelurahan: 57
- 7) Pembagian Administratif :
 - a. Kecamatan Kedungkandang

- b. Kecamatan Sukun
- c. Kecamatan Klojen
- d. Kecamatan Blimbing dan
- e. Kecamatan Lowokwaru

2. Visi Dan Misi Kota Malang

“VISI KOTA MALANG MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Misi Kota Malang:

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan social

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

B. Statistik Deskriptif

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kota Malang yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017. Gambaran umum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan umur.

a. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	83	83%
Perempuan	17	17%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel menunjukkan bahwa sebanyak 83 responden (83%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 17 responden (17%) berjenis kelamin perempuan. Jumlah Responden pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 83 responden (83%).

b. Responden Berdasarkan Umur

Gambaran responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
<25 Tahun	2	2%
25-40 Tahun	28	28%
41-60 Tahun	67	67%
Diatas 60 Tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Tabel menunjukkan mayoritas responden berusia antara 41 tahun sampai 60 tahun yaitu sebanyak 67 responden (67%), selanjutnya berusia antara 25 tahun sampai 40 sebanyak 28 responden (28%), responden berusia diatas 60 tahun sebanyak 3 responden (3%), dan yang berusia di bawah 25 tahun sebanyak 2 responden (2%).

c. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Sekolah	0	0%
SD	0	0%
SMP	12	13%
SMA	35	45%
Diploma/Sarjana	53	42%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel pendidikan terakhir diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Diploma/Sarjana yaitu sebanyak 53 responden (53%), kemudian responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 35 responden (35%), responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 12 responden (12%). Berdasarkan data pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa pendidikan terakhir wajib pajak yang menjadi responden paling banyak adalah Diploma/Sarjana, sehingga diharapkan hasil penelitian yang didasarkan pada jawaban responden bisa maksimal.

d. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
PNS	30	30%
Karyawan Swasta	56	56%
Wiraswasta	4	4%

Lain-Lain	10	10%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan data yang terhimpun menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai Karyawan Swasta yaitu sebanyak 56 responden (56%) dari keseluruhan responden. Selanjutnya PNS dan wiraswasta masing sebanyak 30 (30%) dan 4 (4%) responden. Terakhir responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 10 responden (10%).

2. Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan variasi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Jawaban-jawaban tersebut selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Item	STS		TS		CS		S		SS		Jumlah		Rata-Rata
	f	%	F	%	f	%	F	%	f	%	Jml	%	
X _{1.1}	0	0	1	1	31	31	57	57	11	11	100	100	3,78
X _{1.2}	0	0	1	1	28	28	60	60	11	11	100	100	3,81
X _{1.3}	0	0	1	1	29	29	49	49	21	21	100	100	3,9
													3,83

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Keterangan:

X_{1.1}: Kesadaran wajib pajak membayar pajak sebagai warga negara yang baik.

X_{1.2}: Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan sesuai peraturan yang berlaku.

X_{1.3}: Kesadaran pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada tabel distribusi frekuensi kesadaran wajib pajak item 1.1 untuk jawaban 100 responden, diketahui sebanyak 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, sebanyak 31 responden atau 31% menjawab cukup setuju, sebanyak 57 responden atau 57% menjawab setuju, sebanyak 11 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Rata-Rata jawaban dari responden untuk item 1.1 adalah 3,78. Hal ini diartikan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan dengan tepat sebagai warga negara yang baik.

Item 1.2 diketahui dari 100 responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%, sebanyak 28 responden atau 28% menjawab cukup setuju, sebanyak 60 responden atau 60% menjawab setuju, sisanya sebanyak 11 responden atau 11% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 1.2 adalah 3,81. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden setuju untuk membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item 1.3 diketahui dari 100 responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%, sebanyak 29 responden atau 29% menjawab cukup setuju, sebanyak 49 responden atau 49% menjawab setuju, sisanya sebanyak 21 responden atau 21% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 1.3 adalah 3,9. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden setuju bahwa mereka telah sadar akan pentingnya untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

b. Distribusi Frekuensi Tingkat Ekonomi (X_2)

Keterangan:

$X_{2.1}$: Kemampuan wajib pajak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

$X_{2.2}$: Kemampuan wajib pajak memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tingkat Ekonomi (X_2)

Item	STS		TS		CS		S		SS		Jumlah		Rata-Rata
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	Jml	%	
$X_{2.1}$	1	1	2	2	15	15	75	75	7	7	100	100	3,85
$X_{2.2}$	1	1	1	1	25	25	58	58	15	15	100	100	3,85
													3,85

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Pada tabel distribusi frekuensi tingkat ekonomi item 2.1 untuk jawaban 100 responden, diketahui sebanyak 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 2 reponden atau 2 % menjawab tidak setuju, sebanyak 15 responden atau 15% menjawab cukup setuju, sebanyak 75 responden atau 75% menjawab setuju, sisanya sebanyak 7 responden atau 7% menjawab sangat setuju. Rata-Rata jawaban dari responden untuk item 2.1 adalah 3,85. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden setuju bahwa sebagian responden memiliki tingkat ekonomi yang sedang.

Item 2.2 diketahui dari 100 responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, sebanyak 25 responden atau 25% menjawab cukup setuju, sebanyak 58 responden atau 58% menjawab setuju, sisanya sebanyak 15 reponden atau 15% menjawab sangat setuju. Rata-rata

jawaban dari responden untuk item 2.2 adalah 3,85. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

c. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)

Keterangan:

$X_{3.1}$: Ketepatan pelaksanaan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

$X_{3.2}$: Pemahaman peraturan dan ketentuan pajak bumi dan bangunan.

$X_{3.3}$: Pemahaman system pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)

Item	STS		TS		CS		S		SS		Jumlah		Rata-Rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jml	%	
$X_{3.1}$	2	2	8	8	27	27	61	61	2	2	100	100	3,53
$X_{3.2}$	2	2	21	21	35	35	41	41	1	1	100	100	3,18
$X_{3.3}$	5	5	15	15	26	26	51	51	3	3	100	100	3,32
													3,34

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Pada tabel distribusi frekuensi pengetahuan wajib pajak item 3.1 untuk jawaban 100 responden, diketahui sebanyak 2 responden atau 2% menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 8 reponden atau 8% menjawab tidak setuju, sebanyak 27 responden atau 27% menjawab cukup setuju, sebanyak 61 responden atau 61% menjawab setuju, sisanya sebanyak 2 responden atau 2% menjawab sangat setuju. Rata-Rata jawaban dari responden untuk item 3.1 adalah 3,53. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden setuju untuk melaksanakan kewajiban pajak bumi dan bangunan secara tepat.

Item 3.2 diketahui dari 100 reponden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2% menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 21 responden atau 21% menjawab tidak setuju, sebanyak 35 reponden atau 35%

menjawab cukup setuju, sebanyak 41 responden atau 41% menjawab setuju, sisanya sebanyak 1 reponden atau 1% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 3.2 adalah 3,18. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden memiliki pemahaman peraturan yang cukup mengenai pajak bumi dan bangunan.

Item 3.3 diketahui dari 100 reponden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 5% menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 15 responden atau 15% menjawab tidak setuju, sebanyak 26 reponden atau 26% menjawab cukup setuju, sebanyak 51 responden atau 51% menjawab setuju, sisanya sebanyak 3 reponden atau 3% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 3.3 adalah 3,32. Hal ini diartikan bahwa secara keseluruhan responden memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem pajak bumi dan bangunan.

d. Distribusi Frekuensi Motivasi Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Motivasi Wajib Pajak (Y)

Item	STS		TS		CS		S		SS		Jumlah		Rata-Rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Jml	%	
Y _{1.1}	0	0	7	7	43	43	45	45	5	5	100	100	3,48
Y _{1.2}	0	0	8	8	40	40	46	46	6	6	100	100	3,5
Y _{1.3}	0	0	1	1	14	14	57	57	28	28	100	100	4,12
													3,7

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Keterangan:

Y_{1.1}: Kejujuran dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Y_{1.2}: Kesadaran pelaksanaan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Y_{1.3}: Keinginan dan dorongan pel aksanaan kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Pada tabel distribusi frekuensi pengetahuan wajib pajak item 4.1 untuk jawaban 100 responden, diketahui sebanyak 7 responden atau 7% menjawab tidak setuju, sebanyak 43 responden atau 43% menjawab cukup setuju, sebanyak 45 responden atau 45% menjawab setuju, sisanya sebanyak 5 responden atau 5% menjawab sangat setuju. Rata-Rata jawaban dari responden untuk item 4.1 adalah 3,48. Hal ini diartikan bahwa sebagian besar responden telah melakukan kewajiban perpajakan pajak bumi dan bangunan dengan cukup jujur

Item 4.2 diketahui dari 100 responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 8 responden atau 8%, sebanyak 40 responden atau 40% menjawab cukup setuju, sebanyak 46 responden atau 46% menjawab setuju, sisanya sebanyak 6 responden atau 6% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 4.2 adalah 3,5. Hal ini diartikan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pajak bumi dan bangunan.

Item 4.3 diketahui dari 100 responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%, sebanyak 14 responden atau 14% menjawab cukup setuju, sebanyak 57 responden atau 57% menjawab setuju, sisanya sebanyak 28 responden atau 28% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban dari responden untuk item 4.3 adalah 4,12. Hal ini diartikan bahwa sebagian besar responden terdorong dan termotivasi untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan pajak bumi dan bangunan.

C. Statistik Inferensial

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah dilakukan uji regresi berganda melalui alat bantu SPSS, dilakukan pengujian uji asumsi klasik. Hasil pengujian sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Sebagai salah satu syarat penggunaan statistik parametrik, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian memiliki masalah normalitas atau tidak. Penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability-plot. Hasil analisis grafik menunjukkan bahwa bentuk dari grafik histogram yang membentuk pola berdistribusi normal. Grafik normal probability-plot juga menunjukkan hal yang sama, titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi terbebas masalah normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui bahwa antar variabel independen tidak memiliki hubungan linier atau berkorelasi satu sama lain dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* sebagai indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,870	1,149
X ₂	0,949	1,054
X ₃	0,895	1,118

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai VIF setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 10. Selain itu, nilai tolerance pada setiap variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,1.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap.

Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (yaitu ZPRED) dengan residualnya SRESID. Berikut beberapa dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Jika terdapat pola tertentu dalam grafik, seperti titik-titik yang terlihat membentuk suatu pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan, grafik scatterplot pada model regresi tidak menunjukkan pola yang jelas serta menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

2. Model Persamaan Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat motivasi wajib pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Tingkat ekonomi

X_3 = Pengetahuan wajib pajak

e = *Error*

Berdasarkan hasil regresi dari rumus persamaan tersebut, berikut ini ringkasan hasil analisis regresi dalam penelitian ini:

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi

Variabel	Koefisien
Konstanta	1,180 (1,047)
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,531** (6,357)
Tingkat Ekonomi (X_2)	0,333** (3,211)
Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	0,128 (1,930)
Adjusted R^2	0,443

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

** Signifikan pada level 0,01

* Signifikan pada level 0,05

3. Goodness Of Fit

Pengujian model penelitian dilakukan dengan melakukan cara melihat nilai koefisien determinasi atau *R square* (R^2) yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada model 3 diperoleh nilai adj. R^2 sebesar 0,443 yang menunjukkan bahwa sebesar 44% variasi perubahan variabel motivasi wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya sebesar 56% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Tidak ada ukuran minimum besarnya nilai *R square* sehingga yang menjadi asumsi bahwa jika nilai *R square* suatu model semakin mendekati 1 maka semakin baik, atau sebaliknya bila nilai *R square* semakin mendekati 0 maka model tersebut dianggap semakin buruk.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t yang bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013: 93). Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian, dilihat dari nilai signifikansi uji t. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis 1 adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,531 (6,357) signifikan pada level 0,01. Kesimpulan dari pengujian

hipotesis 1 adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbukti dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini kewajiban pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2 adalah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,333 (3,211) signifikan pada level 0,01. Kesimpulan dari pengujian hipotesis 2 adalah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Tingkat ekonomi terbukti dapat menjadi aspek peningkatan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini kewajiban pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 adalah Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,128 (1,930) tidak signifikan. Kesimpulan dari pengujian hipotesis 3 adalah pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tidak terbukti meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini kewajiban pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis 3 ditolak.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,531 (6,357) signifikan pada level 0,01.

Berdasarkan hasil penelitian disini menunjukkan bahwa kesadaran dari wajib pajak terbukti dapat meningkatkan motivasi wajib pajak. Dengan sadar akan pentingnya pajak, wajib pajak menjadi memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mereka sadar bahwa sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya mereka berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak.

Penerimaan negara sampai saat ini masih didominasi dari sektor pajak, sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dalam hal ini pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kesadaran dari wajib pajak maka wajib akan merasa semakin sukarela untuk membayar pajak, karena membayar pajak bukan lagi hanya sebagai kewajiban tapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban warga negara yang baik.

Menurut Pudjo Susilo (2002:23) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Kedua faktor negatif atau yang menghambat tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para Wajib Pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi calon Wajib Pajak, Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu Jatmiko (2013) yang menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Tingkat ekonomi berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,333 (3,211) signifikan pada level 0,01.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin mapan tingkat ekonomi wajib pajak maka mereka akan merasa semakin tidak terbebani dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang memiliki tingkat ekonomi rendah tentu saja akan merasa keberatan dengan adanya kewajiban perpajakan seperti pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdampak pada kengganannya wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Dalam struktur sosial kemasyarakatan banyak terdapat ukuran-ukuran di dalam pelapisan-pelapisan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah stratifikasi sosial, diantaranya adalah pelapisan yang terjadi karena kekayaan seseorang yang lebih dikenal dengan sebutan tingkat ekonomi. Sebelum beranjak lebih jauh untuk memahami hal tersebut perlu untuk menelaah kembali pengertian dari ekonomi itu sendiri sebagai arti dasar pembentukan tingkatan atau pelapisan yang terjadi di dalam struktur social kemasyarakatan tersebut. Ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu “oikos” dan “nomos” yang berarti tata laksana rumah tangga (Rosyidi, 2009:5).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan Penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

wajib pajak, Imaniah (2013). Jadi Tingkat ekonomi menjadi faktor penentu seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak, koefisien dan nilai t adalah 0,128 (1,930) tidak signifikan.

Pengetahuan wajib pajak disinyalir dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk memberikan dorongan/ memotivasi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seringkali wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan justru bersikap tidak peduli terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal. Pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, mengerti, dan pandai (Salam, 2003:26). Pengetahuan adalah merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu obyek tertentu (Mubarok, dkk, 2007:34).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian terdahulu, yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak, Istanto(2015). Bukti baru ini bisa menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya untuk diteliti lebih mendalam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesadaran Wajib Pajak, tingkat ekonomi, dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berikut ini beberapa kesimpulan dari peneliti:

1. Kesadaran dari wajib pajak terbukti dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak. Dengan sadar akan pentingnya pajak, Wajib Pajak menjadi memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mereka sadar bahwa sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya mereka berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak.
2. Tingkat ekonomi berpengaruh terhadap tingkat motivasi wajib pajak, sehingga semakin mapan tingkat ekonomi Wajib Pajak maka mereka akan merasa semakin tidak terbebani dengan adanya kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pengetahuan Wajib Pajak disinyalir dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk memberikan dorongan/ memotivasi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain.

Saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak yang cukup belum bisa memberikan pengaruh motivasi kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perlu adanya upaya lebih dari fiskus dalam memberikan edukasi bukan hanya sekedar upaya mengedukasi mengenai tata aturan perpajakan saja, tapi lebih kepada pemahaman yang lebih mendalam dari pajak itu sendiri seperti kenapa pajak itu ada dan seberapa penting pajak bagi kelangsungan negara Indonesia.
2. Persepsi Wajib Pajak mengenai pajak itu sendiri juga berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak. Perlu adanya gambaran positif secara umum mengenai pajak. Contohnya seperti wacana perubahan penamaan Wajib Pajak menjadi pembayar pajak, hal-hal seperti ini bisa memberikan persepsi positif dari wajib pajak. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak dianggap sebagai beban oleh Wajib Pajak, namun membayar pajak disini memang menjadi sebuah tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Eko Sujianto. (2007). *Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta.
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Danang, Sunyoto. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hair et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*, Seventh Edition. Pearson Prentice Hall
- Ilyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Markus, Muda, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moh. Zain, 2004, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2006. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, buku 1 edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono. 2002. *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilo, Sri Y,dkk, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Kelima Belas, Bandung : Alfabeta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 *.Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tjahyono, A, dan Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Prof. Dr. Veithzal, Rivai, M.BA. Prof. Dr. Deddy, Mulyadi, M.Si. 2010. *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Edisi 3. Dalam koontz. 1990(Ed.), *Teori Motivasi & Pengertian Motivasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ariyanto, 2013, *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- Agus Nugroho Jatmiko, 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.

- Bambang, Suhardito, 1996, *Pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.*
- Fasmi, Lasnofa., dan Fauzan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang.*
- Maulida, A.N, 2011. “*Pengaruh Penyuluhan, Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Uang Pajak oleh Pemerintah Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan*”.
- Putri, Surya. & Isgiyarta, Jaka. 2013. *Analisis pengaruh pengetahuan Umum, tingkat ekonomi, dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan PBB masyarakat desa dan Kota dengan variabel moderating Kontrol petugas desa/kelurahan, studi kasus pada kabupaten demak.* Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 nomor 3, ISSN (online) 2337-3806.
- Suhardito, 2006, *Pengaruh sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan WP*
- Supadmi. 2010. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.* Jurnal Keuangan Publik, 4(1),105-121
- Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen.* Jakarta : Rajawali Press Yanah. 2013. *The Impact of Administratif sanction and understanding of Income Tax Law On Corporate Taxpayer’s Compliance, The International Journal of Social Sciences*, 30 June 2013, Vol 12 No. 1.